

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD
(STUDI PADA SKPD PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA)**

Oleh :

Natya Sekar Arum

Pembimbing: Raja Adri Setiawan dan Rheny Afriana Hanif

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : natyaarum@yahoo.com

*Influence Of Budgeting Participation, The Effect Of Budgeting Goal
And Public Accountability To Managerial Performance on SKPD
(Empirical Study On Government lima Puluh Kota)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of budgeting participation, the effect of budget goal and public accountability to managerial performance SKPD on government Lima Puluh Kota. This study uses a purposive sampling method with 96 respondents. Data collection techniques in this study is in the form of questionnaires, while data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 17 for windows. From the results of the testing that has been done, simultaneous regression test (F test) showed that all independent variables studied have a simultaneous effect on managerial performance SKPD. Partial regression test (t test) showed that the variables budgeting participation and effect of budgeting goal are partially affect the variable local managerial performance SKPD, while public accountability variables do not affect the variables local managerial performance SKPD.

Keyword: bugeting participation, effect of bugeting goal, public accountability, managerial and performance on SKPD.

PENDULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah salah satunya adalah masalah anggaran. Dengan adanya otonomi daerah, penyusunan kebijakan anggaran daerah tidak lagi dibuat di

pemerintah pusat, melainkan dibuat di pemerintahan daerah sendiri.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial dan, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya. Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan daerah khususnya yang berhubungan dengan anggaran. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 3 fungsi utama organisasi sektor publik, yaitu (1) melakukan pelayanan kepada publik, (2) mendefinisikan prinsip operasional masyarakat, (3) menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu kinerja SKPD diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian kinerja pada pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengevaluasi kinerja periode yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan strategi pemerintah untuk periode berikutnya. Kinerja juga merupakan salahsatu kunci keberhasilan SKPD dalam

menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena dengan kinerja yang baik pencapaian good governance akan senantiasa terbuka lebar

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut Bastian (2009) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya yang ditetapkan dalam anggaran (Prihandini, 2011).

Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, alokasi dan indikator kerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan kepada panitia eksekutif. Panitia Eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja

berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas pihak legislatif (Permendagri No 13 Tahun 2006).

Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapainya tujuan institusi terkait. Aparat perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat SKPD pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memunculkan perasaan berprestasi dan yang akan meningkatkan kinerjanya (Anggraini 2009).

Menurut Kennis (1979) dalam Putra (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD; 2) apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerjamanajerial SKPD; 3) apakah akuntabilitas publik dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk menguji dan memberi bukti empiris tentang pengaruh partisipasi dalam

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD.

2. Untuk menguji dan memberi bukti yang empiris tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD.

3. Untuk menguji dan memberi bukti yang empiris tentang pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD.

TELAAH PUSTAKA

Kinerja Manajerial SKPD

Indra Bastian (2009) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan saran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Mahoney dkk (1963) dalam Natalia (2010) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Koordinasi, menyalurkan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.

4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.

5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.

6. Pemilihan Staff, yaitu memilih dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.

7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.

8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu. Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan tujuan organisasi yaitu sebagai perencanaan, pengkoordinasian dan sebagai fungsi pengendalian. Untuk itu anggaran dapat mengontrol aktivitas unit kerja organisasi sesuai dengan apa yang dianggarkan.

Menurut Govindrajan (2005) partisipasi anggaran adalah : partisipasi anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran dan partisipasi dianggap sebagai sarana aktualisasi yang terbaik buat para pekerja dalam rangka meningkatkan diri mereka kepada masing-masing tanggung jawab dan tugas yang diemban. Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap

anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam partisipasi anggaran pada akuntansi sektor pemerintahan terdapat empat siklus anggaran yang meliputi empat tahap sebagai berikut 1. Tahap persiapan anggaran. Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan adanya penafsiran tersebut maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, yaitu dengan cara melakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain adanya penaksiran perlu disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran

2. Tahap Ratifikasi. Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill*, namun juga harus mempunyai *political skill*, dan *coalition building* yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental (*coalition building*) sangat penting, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala

pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi /pelaksanaan anggaran. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan publik mempunyai sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan

Kejelasan Sasaran Anggaran

Deddy Nordiawan dalam Akuntansi Sektor Publik (2006) menjelaskan tujuan anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. Kennis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Kejelasan tujuan anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi. Keterlibatan individu dalam

penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung dan tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Menurut Locke dan Latham dalam Putra (2013), agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang di perlukan, yaitu :

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum, dan tugas-tugas yang harus di kerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat di ukur.
3. Standar, menetapkan standar dan target yang di capai.
4. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang di butuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran berdasarkan prioritasnya.
6. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitannya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam (Mardiasmo 2009:21), yaitu: 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Lingkup Akuntabilitas Publik.

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas

hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya..

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Dalam pelaksanaan kegiatan, organisasi publik menggunakan dana yang berasal dari publik. Organisasi publik melaksanakan suatu kegiatan setelah dananya tersedia.. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan kerjasama yang

baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajeri dalam penyusunan anggaran yang dinakan dengan partisipasi penyusunan anggaran.

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif, diharapkan kinerja unit kerja organisasi akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan/standar yang dirancang secara partisipatif disetujui oleh pimpinan, maka pegawai akan bersungguh-sungguh dalam tujuan/standar yang telah ditetapkan dan pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

H1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jela. Kennis (1979) dalam Bangun (2009) , kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan

spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing SKPD mampu meningkatkan kinerjanya
H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Manajerial SKPD

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Menurut Putra (2013) pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Menurut Bastian (2005).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2009).

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya

akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

H3: : Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial SKPD

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berjumlah 42 SKPD. Penelitian ini dilakukan di Dinas, Badan dan Kantor yang terdapat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebanyak 42 Dinas. Responden dari penelitian ini adalah Sekretaris, Kasubag Keuangan, dan Kasubag PP di seluruh SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berjumlah 96 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebarkan pada 42 SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota secara langsung. Setiap sampel masing masing SKPD terdiri dai 3 responden. Dari 126 kuisisioner yang disebarkan, kuisisioner yang kembali sebanyak 96 kuisisioner

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std deviation
Kinerja manajerial SKPD	96	20.00	39.00	30.3750	4.09428
Partisipasi penyusunan anggaran	96	12.00	30.00	22.2604	3.83130
Kejelasan sasaran anggaran	96	23.00	35.00	29.517	3.19512
Akuntabilitas publik	96	24.00	45.00	38.0938	4.75744
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Pengolahan data SPSS, 2015

Berdasarkan pengujian statistik diatas variabel kinerja manajerial SKPD nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum 39 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.3750 dengan standar deviasi sebesar 4.09428. Nilai rata-rata 30.3750 menunjukkan bahwa besarnya Kinerja Manajerial SKPD sebesar 30.3750 .Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi Kinerja Manajerial SKPD menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

variabel partisipasi penyusunan anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum 30 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.2604 dengan standar deviasi sebesar 3.83130.

Nilai rata-rata 3.83130 menunjukkan bahwa besarnya kapasitas partisipasi penyusunan anggaran sebesar 3.83130. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi partisipasi penyusunan anggaran ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Kejelasan sasaran anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29.5417 dengan standar deviasi sebesar 4.10495. Nilai rata-rata 29.5417 menunjukkan bahwa besarnya kejelasan sasaran anggaran sebesar 29.5417. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kejelasan sasaran anggaran ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya. 257

Dan akuntabilitas publik mempunyai nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum 45 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 38.0938 dengan standar deviasi sebesar 4.75744. Nilai rata-rata 38.0938 menunjukkan bahwa besarnya akuntabilitas publik sebesar 38.0938. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akuntabilitas publik ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai r_{hitung} dari item pernyataan untuk semua variabel lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk

variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan kinerja manajerial SKPD adalah valid.

Tabel 2
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbachs alpha	Nilai kritis	Kesimpulan
Kinerja (Y)	0,724	0,6	Reliabel
Partisipasi penyusunan anggaran (X1)	0,769	0,6	Reliabel
Kejelasan sasaran anggaran (X2)	0,885	0,6	Reliabel
Akuntabilitas publik (X3)	0,896	0,6	Reliabel

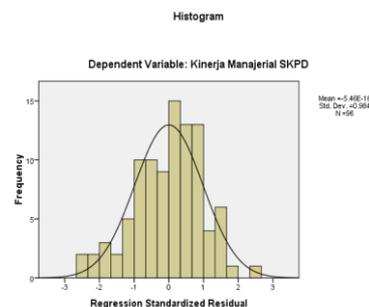
Sumber : Pengolahan data, 2015

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Dari hasil perhitungan model regresi, penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Cara untuk menguji normalitas data dengan melihat histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal seperti gambar berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Pengolahan data, 2015

Data dikatakan berdistribusi normal apabila data menyebar didalam daerah outlier (-3 hingga +3). Dengan melihat tampilan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang bersifat ekstrim atau berada diluar outlier dikarenakan data seluruhnya berada diantara -3 hingga +3. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan melihat grafik histogram dapat dikatakan data telah berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Selain itu dilakukan ujimultikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.880	1.136
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.616	1.624
	Akuntabilitas Publik	.683	1.464

Sumber : Pengelohan data, 2015

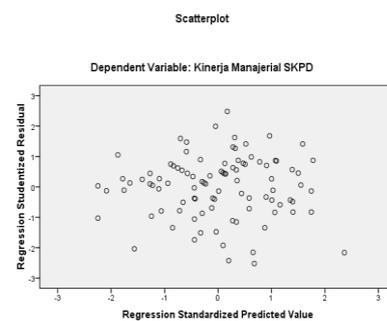
Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Selain itu juga dilakukan Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Berikut adalah gambar hasil uji heteroskedastisitas.

Gambar 2

Hasil Uji Heterokedasitas



Sumber: Pengelohan data , 2015

Dari gambar *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak. Dengan demikian dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

H₁: Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan mebandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu t hitung

(6,640) > t tabel (1,986) dan Sig. (0,000) < 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan sarana bagi pegawai atau aparat pemerintah untuk dapat mengerti terhadap apa yang akan mereka kerjakan (Bangun 2009). Ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya sehingga aparat SKPD pemerintah daerah merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya dan muncul prestasi prestasi dari tanggung jawab yang dipegang dan sehingga meningkatkan kinerja SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Amril 2014) dan Bangun (2009) yang menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKDP.

H₂: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu t hitung (2,730) > t tabel (1,986) dan Sig. (0,008) < 0,05. dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (Nordiawan 2006). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja. dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi fungsi pemerintah daerah sehingga perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Jadi Pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD adalah bahwa anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas Hasil penelitian ini sejalan dengan Putra (2013) dan Bangun (2009) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKDP.

H₃: Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{sig.}t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Jadi hasilnya adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu t hitung (1,213) < t tabel (1,986) dan Sig. (0,228) > 0,05 dengan demikian **H_0 diterima** dan H_3 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Hipotesis ketiga ini membuktikan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik belum tentu dapat meningkatkan kinerja skpd. Hal ini menunjukkan bahwa aparaturnya pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril (2014) dan Wahyuni (2014) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas publik 260 berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2009) dan Sari (2014) dan yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang

mendekati satu variabel independen mampu dengan baik menjelaskan variasi variabel independen. diketahui nilai Adjusted R^2 sebesar 0,477. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial SKPD sebesar 47,7%. Sedangkan sisanya 52,3% (100% - 47,7%) dipengaruhi oleh variabel lain seperti desentralisasi, komitmen organisasi, pengawasan internal dan lain-lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Artinya hipotesis ketiga ini ditolak.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Data penelitian ini berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuesioner yang dapat mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dan mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui teknik wawancara.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik sehingga berkemungkinan terdapat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD yang lebih besar daripada ketiga variabel independen dalam penelitian ini.

Saran

Dengan pertimbangan 261 keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti yang akan datang dapat meneliti kembali keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan metode lain seperti wawancara langsung dengan responden sehingga lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
2. Penelitian selanjutnya, disarankan dapat meneliti dengan memasukkan variabel-variabel lainnya sehingga dapat mempengaruhi kinerja

manajerial SKPD secara menyeluruh.

3. Bagi instansi yang dalam hal ini SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mempertahankan kinerjanya karena kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah berada di atas rata-rata. Dan SKPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat atas program-program yang dilaksanakan.
4. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sedikitnya jumlah sampel yang diteliti, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperbesar jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Rafika. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Amril, Vony Nofisa. 2014. *“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sijunjung)”*. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Bangun, Adrias. 2009. *“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan*

- Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi*". Tesis Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Deddi Noerdiawan, dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harefa, Kornelius. 2008. "*Analisis Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komunikasi Sebagai Variabel Moderating pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk di Medan*". Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Kenis, I. 1979. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*.
- Mahoney, T.A. Jerdes, T.H. Carrol, S.J. 1963. *Development Managerial Performance : A Research Approach*. South Westren: Publising Co.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putra, Deki 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Padang)*. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Wahyuni, Rozi. 2014. "*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD*". Skripsi, Universitas Riau